

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Usaha Penangkapan Ikan di Laut

Sektor perikanan secara umum memiliki karakteristik yang agak berbeda dari subsektor pertanian lainnya. Kegiatan usaha perikanan umumnya dilaksanakan di perairan yang bersifat ‘ milik bersama’ dan “terbuka akan jangkauan” serta dimanfaatkan oleh hampir seluruh sektor pembangunan (Ilyas, 1991). Usaha penangkapan ikan di laut sama dengan usaha berburu, prosesnya bersifat ekstraktif yaitu mengambil hasil dari alam tanpa usaha mengembalikan sebagian hasil tersebut untuk keperluan pengambilan di kemudian hari. Dalam usaha perikanan, modal dan tenaga kerja yang trampil memegang peranan penting dalam suatu proses produksi.

Pekerjaan sebagai nelayan tidak diragukan lagi adalah pekerjaan yang sangat berat. Ketrampilan sebagai nelayan bersifat sederhana dan hampir sepenuhnya dapat dipelajari dari orang tua mereka sejak kecil. Mereka yang menjadi nelayan tidak dapat membayangkan pekerjaan lain yang lebih mudah, sesuai kemampuan yang mereka miliki. Kebanyakan dari mereka tidak mampu membebaskan diri dari profesi nelayan (Mubyarto, 1984). Pekerjaan sampingan yang dapat menghasilkan uang pada musim paceklik atau musim tidak ada kegiatan menangkap ikan tidak dapat dilakukan oleh para nelayan bukan hanya sebab lingkungan alam yang tidak memungkinkan mereka melakukan pekerjaan lain di luar menangkap ikan di laut, tetapi lebih disebabkan oleh tidak adanya keahlian selain menangkap ikan (Zulkifi, 1992).

Pemanfaatan sumberdaya perikanan laut mempunyai resiko yang relatif besar. Refleksi dari resiko yang relatif besar tersebut dinyatakan oleh jumlah hari kerja nelayan. Survei Sosial Ekonomi Perikanan Laut di pantai utara pulau Jawa yang dilakukan Departemen Perikanan (1990) menunjukkan bahwa rata-rata jumlah jam kerja yang digunakan nelayan untuk melakukan kegiatan perikanan

B. Pengertian dan fungsi kredit

Menurut UU Perbankan No:10 Th 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (1999) antara lain: (a) mencari keuntungan, nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju usahanya, bank memperoleh hasil dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah; (b) membantu usaha nasabah, membantu usaha nasabah yang memerlukan dana baik dana investasi maupun modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan memperluas usahanya; (c) membantu pemerintah. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Menurut Sumodiningrat (1991) peningkatan kegiatan usaha di pedesaan, terutama diluar sektor pertanian akan sangat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan selanjutnya taraf hidup mereka. Tingkat hidup masyarakat pedesaan umumnya relatif rendah disebabkan pendapatan dari sektor pertanian kecil, maka ruang gerak mereka untuk memulai kegiatan usahanya diluar sektor pertanian sangat terbatas. Pada umumnya mereka kekurangan modal dalam kegiatan usahanya. Kalaupun dapat memperoleh pinjaman modal, seringkali terikat pada pemberi pinjaman gelap dengan bunga yang lebih tinggi daripada bunga bank. Namun bagi masyarakat pedesaan lembaga kredit swasta ini merupakan alternatif yang dapat dipilih.

Dalam perkembangan usaha, usaha kecil dan menengah kalah bersaing dengan usaha besar. Keterdesakan ini terkait dengan permasalahan permodalan yang dihadapi oleh industri kecil dan rumah tangga. Pemanfaatan perbankan untuk memenuhi kebutuhan modal ternyata belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya karena adanya beberapa peraturan yang dirasakan berat oleh industri kecil dan industri rumah tangga tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan usaha kecil dan rumah tangga tersebut enggan berhubungan dengan bank dan lebih memilih

mencari sumber permodalan lain yang bersifat non formal seperti melalui rentenir walaupun harus dikenakan bunga yang tinggi dan jasa pinjaman dari proyek-proyek pemerintah, contohnya Inpres Desa Tertinggal dan Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-nelayan Kecil (P4K). Ini menunjukkan bahwa industri kecil dan rumah tangga lebih memperoleh kemudahan dalam mengakses kredit jika mereka tergabung dalam proyek - proyek pemerintah tersebut, seperti kemudahan syarat-syarat pengajuannya, prosedur, kecepatan pelayanannya serta bunga yang ringan.

C. Program PEMP

Program kredit desa agar dapat membantu meningkatkan pendapatan, harus dapat dimanfaatkan bagi usaha-usaha yang produktif. Atau dari segi lain lembaga pedesaan harus dapat membantu melepaskan penduduk desa yang berpendapatan rendah dari ikatan-ikatan para pelepas uang yang sangat merugikan.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan salah satu dari sekian banyak usaha pemerintah dan masyarakat untuk membantu nelayan kecil melepaskan diri dari kemiskinannya. Program PEMP merupakan suatu proyek penyuluhan pertanian yang ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian nelayan kecil agar mau dan mampu menjangkau fasilitas yang tersedia untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Tujuan proyek ini adalah (a) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir sasaran program melalui pengembangan usaha produktif; (b) mandirinya koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro-Mitra Mina (LEPP-M3 secara profesional sebagai lembaga masyarakat pesisir; (c) terbentuknya mekanisme hubungan saling menguntungkan antara LEPP-M3, Bank Bukopin, Pemerintah dengan masyarakat pesisir secara alamiah sehingga terwujud masyarakat pesisir yang mandiri dalam kebersamaan.; (d) berkembangnya sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul yang didukung oleh meningkatnya kemajuan SDM,/nelayan/masyarakat pesisir, sarana prasarana kegiatan usaha yang relatif memadai); (e) berkembangnya Lembaga keuangan masyarakat pesisir yang secara tidak langsung membiasakan masyarakat pesisir dengan aturan perbankan; (f) aliran tambahan permodalan bagi Swamitra Mina dari perbankan sebagai

Program PEMP ini merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang dapat dilakukan dengan cara memberdayakan si miskin (*Empowering*) yang dilaksanakan melalui proses yang berkelanjutan berdasarkan pada peningkatan kemampuan menghasilkan pendapatan sehingga mereka mampu menjangkau akses terhadap fasilitas/kemudahan-kemudahan pembangunan yang tersedia dalam aspek. : (a) sumber daya, adalah bahwa si miskin tersebut mampu meningkatkan pemilikan/ pengusahaan usahanya dan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja baik dirinya, keluarganya dan atau tenaga kerja dari luar; (b) permodalan, adalah mereka mampu mendapatkan modal yang diperlukan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya dari lembaga keuangan formal; (c) teknologi, adalah mereka mampu menerapkan sistem cara-cara kerja yang bisa meningkatkan produktivitas yang dihasilkannya sehingga dapat memberikan nilai tambah tanpa merusak lingkungan; (d) pasar, adalah mereka mampu menjual hasilnya dengan lancar dan dengan harga yang layak serta berkelanjutan.

Dana program PEMP berasal dari APBN dan kompensasi BBM serta dukungan penuh dari Departemen Kelautan dan Perikanan , kini program PEMP telah dilaksanakan di 247 kabupaten dengan jumlah LEPP-M3 kurang lebih 300 buah. Hasilnya cukup menggembirakan, pendapatan nelayan sebelum dan sesudah mengikuti program PEMP mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dai Rp 392.569/bulan/kepala keluarga meningkat menjadi RP 737.476/bulan/kepala keluarga.

Besarnya DEP yang digulirkan ke masyarakat pesisir melalui kelompok masyarakat pemanfaat, maka jumlah KMP pun juga bertambah dari tahun ke tahun. Tahun 2001 jumlah KMP 2305 setelah perguliran meningkat menjadi 3.174 KMP. Tahun 2002 jumlah KMP 2541 setelah perguliran menjadi 2976 KMP. Tahun 2003 jumlah KMP ...

Tabel 1. Rekapitulasi Program PEMP 2001-2003

Uraian	Tahun			Keterangan
	2001	2002	2003	
Dana Ekonomi Produktif (rupiah)	78 milyar 89 milyar	71 milyar 87 milyar	77 milyar 80 milyar	Saat proyek Setelah proyek
Jumlah KMP (Kelompok Masyarakat Pemanfaat)	2.305 3.174	2.541 2.976	2.691 2.783	Saat proyek Setelah proyek
Pendapatan anggota (Rp/bulan)	423.118 664.769	392.569 737.476	280.248 341.342	Saat proyek Setelah proyek
Tabungan (rupiah)	333.141.072	978.924.495	903.221.769	Setelah proyek

Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005

Agar masyarakat pesisir dapat mengakses dengan mudah Swamitra Mina dan BPR pesisir serta mengelola secara efisien modal yang telah diperolehnya, maka disediakan Tenaga Pendamping Desa (TPD) masing-masing dua orang tiap kabupaten/kota. Upaya untuk memperkuat bagi masyarakat pesisir pada tahun 2004 dibangun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang terdiri dari 139 Swmitramina, 9 unit simpan pinjam, dan 12 BPR- Pesisir.

LEPP-M3 sebagai LKM memberikan kredit ke masyarakat pesisir dengan tingkat suku bunga bervariasi di setiap daerah yaitu berkisar antara 13-24 % per tahun efektif. Hadirnya LKM Swamitra Mina maka secara bertahap peran tengkulak dan rentener akan berkurang dan LKM memobilisasi dana masyarakat dengan adanya suku bunga tabungan yang menarik. Dengan lancarnya pengelolaan LKM Swamitra Mina maka lambat laun bantuan modal yang disalurkan bukan berasal dari APBN tapi dari LKM Swamitra Mina.

D. Persepsi

Persepsi (*perception*) dalam arti sempit menurut Dyah (1983) adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Jadi persepsi adalah suatu cara pandang, pengertian dan interpretasi seseorang tentang sesuatu obyek yang diinformasikan kepadanya, terutama cara orang tersebut memandang, mengartikan dan menginterpretasikan

informasi itu dengan cara mempertimbangkan hal tersebut dengan dirinya dan lingkungan tempat dia berada. Wiryadi (1996) juga mengatakan bahwa persepsi merupakan hasil pengamatan terhadap suatu obyek atau peristiwa melalui panca indera, sehingga diperoleh suatu pemahaman atau penilaian. Informasi yang disampaikan kepada seseorang akan menyebabkan individu membentuk persepsi. Persepsi adalah proses bagaimana seseorang individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti (Kotler, 1997).

Persepsi dianggap dapat mempengaruhi perilaku. Persepsi yang positif terhadap pertanian modern akan mendorong adopsi berbagai macam inovasi. Nelayan yang mempunyai persepsi positif terhadap PEMP, yaitu persepsi nelayan yang berpandangan bahwa proyek PEMP ini akan benar-benar membantu nelayan dalam mengembangkan usahanya, sehingga nelayan akan masuk dalam program PEMP tersebut untuk kemajuan kegiatan usahanya. Persepsi nelayan terhadap PEMP diartikan sebagai cara pandang, perasaan maupun pendapat nelayan terhadap proyek PEMP. Cara pandang disini adalah bagaimana kredit dan pembinaan yang diberikan dalam proyek PEMP ini dapat benar-benar membantu dalam meningkatkan taraf hidup nelayan

Atmojo (2002) menyebutkan bahwa variabel pendidikan, pengetahuan, luas lahan dan persepsi terhadap kredit berpengaruh nyata terhadap kekuatan motivasi dalam pengambilan kredit. Motivasi petani dalam pengambilan kredit ketahanan pangan yang terbesar adalah untuk pemenuhan kebutuhan fisiologis yaitu pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Hasil penelitian Indriastuti (2003) menunjukkan bahwa persepsi sebagian besar petani terhadap fungsi kelompok tani tergolong sedang. Ada hubungan yang nyata antara pendidikan formal, pendidikan non formal dan pengalaman kredit yang tepat akan sangat membantu dengan persepsi terhadap fungsi kelompok tani. Sedang umur dan pendapatan tidak ada pengaruh nyata terhadap kelompok tani. Suharti (1998) dalam penelitiannya menyebutkan terdapat pengaruh secara langsung antara tingkat pendidikan, sumber informasi mengenai IDT, hubungan antara petani dan pendamping, persepsi terhadap pendamping, persepsi petani mengenai kelompok masyarakat dan persepsi mengenai dana IDT. Semakin tinggi

persepsi petani mengenai kelompok masyarakat dan semakin benar persepsi mengenai dana, maka semakin terarah penggunaan dana IDT pada rumah tangga petani.

E. Pembinaan Nelayan

Pemerintah melalui Departemen Perikanan dan Kelautan selama ini telah melakukan kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang berjalan berdasarkan kebijakan KepMen 41 Tahun 2000 Departemen Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum pengelolaan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Tujuan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (DKP, 2002). Kebijakan tersebut menghendaki perlu adanya partisipasi masyarakat, karena keikutsertaan masyarakat akan membawa dampak positif, mereka akan memahami berbagai permasalahan yang muncul serta memahami keputusan akhir yang akan diambil. Untuk itu, dalam partisipasi masyarakat diperlukan adanya komunikasi dua arah yang terus menerus dan informasi yang berkenaan dengan program, proyek atau kebijakan yang disampaikan dengan bermacam-macam teknik yang tidak hanya pasif dan formal tetapi juga aktif dan informal (Hadi dalam Harahap, 2001).

Salah satu faktor yang penting untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat nelayan adalah pembinaan yaitu antara lain; melalui penyuluhan dan pendidikan yang terus menerus kepada masyarakat setempat. Pembinaan masyarakat dapat dilihat dari beragam pendekatan, sehingga dapat memahami pokok-pokok pikiran tentang pembinaan yaitu antara lain ; pembinaan merupakan suatu sistim pendidikan non formal, yang berupaya mengubah perilaku sarannya

Konsep pembinaan masyarakat nelayan dalam kerangka perspektif pembangunan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia perlu dikaji secara baik, tepat dan menyentuh sasaran yang ingin dicapai mengingat pertimbangan beberapa faktor, antara lain; pembinaan masyarakat nelayan melibatkan banyak pihak yaitu dari pemerintah lembaga pendidikan swasta lembaga lembaga non

pemerintah maupun masyarakat nelayan sendiri; proses pembinaan yang berlangsung harus dilakukan secara terus menerus dan simultan dengan masyarakat nelayan sehingga menimbulkan perubahan-perubahan yang sesuai dengan tujuan pembangunan perikanan yang diharapkan.

Permasalahan yang dapat dikemukakan disini adalah bagaimana sistem pembinaan masyarakat nelayan yang merupakan bagian dari pembangunan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia yang dapat menumbuhkan serta meningkatkan partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan wilayah pesisir

Pembinaan masyarakat nelayan sebagai suatu proses penyuluhan dan pendidikan non formal dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pembinaan masyarakat nelayan merupakan suatu proses penyebarluasan informasi yang diperlukan dan berkembang selama pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan. Informasi tersebut dapat berupa inovasi atau teknologi perikanan dan kelautan yang dihasilkan dari penelitian maupun pengalaman lapang, masalah-masalah yang perlu memperoleh pemecahannya, maupun peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah demi terlaksana dan tercapainya tujuan pembangunan perikanan yang direncanakan. Alur informasinya dapat bersifat vertikal yaitu : peneliti, pembina, masyarakat nelayan (dan sebaliknya) atau penentu kebijakan, pembina dan masyarakat nelayan (dan sebaliknya). Dapat juga bersifat horisontal yaitu : antar aparat penentu kebijakan, antar peneliti, antar pembina, antar masyarakat nelayan ataupun antar lembaga sederajat yang saling terkait.
2. Pembinaan masyarakat nelayan merupakan proses penerangan. Penerangan kepada masyarakat nelayan tentang segala sesuatu yang belum diketahui dengan jelas untuk dilaksanakan atau diterapkan dalam rangka peningkatan produksi dan pendapatan atau keuntungan yang ingin dicapai melalui proses pembangunan perikanan. Penerangan yang dilakukan tidaklah sekedar memberikan penerangan, tetapi penerangan yang dilakukan selama pembinaan masyarakat nelayan harus terus menerus dilakukan sampai betul-betul diyakini oleh pembina bahwa

segala sesuatu yang telah diterangkan benar-benar telah dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh masyarakat nelayan.

3. Pembinaan sebagai proses perubahan perilaku. Tujuan yang sebenarnya dari pembinaan masyarakat nelayan adalah terjadinya perubahan perilaku yaitu pengetahuan, sikap dan ketrampilan di kalangan masyarakat nelayan agar mereka tau, mau dan mampu melaksanakan perubahan-perubahan dalam pengelolaan wilayah pesisir demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat nelayan yang ingin dicapai melalui pembangunan perikanan.

Melalui pembinaan, ingin dicapai suatu masyarakat nelayan yang memiliki pengetahuan luas tentang berbagai ilmu dan teknologi perikanan dan kelautan, memiliki sikap yang progresif untuk melakukan perubahan dan inovatif terhadap sesuatu yang baru, serta trampil dan mampu berswadaya untuk mewujudkan keinginan dan harapan-harapannya demi tercapainya perbaikan kesejahteraan masyarakat nelayan.

4. Pembinaan merupakan proses pendidikan, memiliki ciri-ciri sebagai :
 - a. sistim pendidikan non formal yang terencana atau terprogram dapat dilakukan dimana saja baik di dalam ruangan maupun diluar ruangan bahkan dapat dilakukan sambil bekerja ("learning by doing"); tidak terikat waktu baik, penyelenggara maupun waktunya disesuaikan dengan kebutuhan nelayan ; pembina dapat berasal dari salah satu peserta didik.
 - b. Sistim pendidikan orang dewasa sehingga metoda pendidikan lebih banyak bersifat lateral yang saling mengisi dan berbagi pengalaman dibanding dengan pendidikan yang sifatnya vertikal atau menggurui/ceramah ; keberhasilannya tidak ditentukan oleh jumlah materi atau informasi yang disampaikan tetapi seberapa jauh tercipta dialog antara pendidik dan peserta didik; sasaran utamanya adalah orang dewasa baik dewasa dalam arti biologis maupun psikologis.
5. Pembinaan merupakan proses rekayasa sosial dimana perlu dilaksanakan secara bijak dan hati-hati serta harus diawasi agar tidak menimbulkan

kepada upaya terciptanya tujuan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat nelayan yang sebenarnya ingin diperbaiki mutu hidupnya.

Telah dipahami bahwa pembinaan masyarakat nelayan merupakan proses perubahan perilaku sehingga efektivitas pembinaan dapat diukur dari seberapa jauh perubahan perilaku masyarakat nelayan menyangkut pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang dapat diamati pada :

- a. Perubahan-perubahan pelaksanaan kegiatan perikanan mencakup macam dan jumlah sarana produksi serta peralatan penangkapan ikan yang digunakan maupun teknik penangkapannya.
- b. Perubahan-perubahan tingkat produktivitasnya dan pendapatan masyarakat nelayan
- c. Perubahan dalam pengelolaan usaha (perorangan, kelompok) serta pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari usaha perikananannya.

Faktor faktor yang mempengaruhi proses pembinaan masyarakat nelayan melalui upaya penyuluhan, dapat terjadi karena :

- a. Keadaan pribadi masyarakat sasaran, yang terutama tergantung kepada motivasinya untuk melakukan perubahan.
- b. Keadaan lingkungan fisik yang mencakup keadaan sumberdaya alam, iklim suhu air, salinitas yang akan mempengaruhi tingkat kesuburan perairan.
- c. Lingkungan sosial dan budaya masyarakat nelayan yang tinggal di pulau-pulau kecil
- d. Macam dan aktivitas kelembagaan yang tersedia untuk mendukung dan menunjang kegiatan pembinaan masyarakat nelayan.

F. Pendapatan Nelayan

Nelayan pada umumnya bekerja sebagai penangkap ikan dan tidak mempunyai pekerjaan sampingan sebagai akibat tidak adanya keahlian selain menangkap ikan di laut (Zulkifi, 1999). Oleh karena itu penangkapan ikan merupakan sumber pendapatan utama. Atas dasar tersebut, pendapatan nelayan yang dimaksud adalah pendapatan bersih yang diterima nelayan dalam periode waktu tertentu dalam menjalankan pekerjaannya

. Pendapatan nelayan yang diperoleh dari usaha penangkapan ikan kadang-kadang hanya untuk mencukupi kebutuhan nelayan sendiri. Nelayan tidak memiliki pendapatan yang lebih untuk membiayai usahanya agar bisa memberikan hasil yang lebih tinggi. Kemampuan nelayan dalam mengelola hasil tangkapan ikan sangat terbatas, selain itu juga tingkat pendidikan relatif rendah.

Untuk meningkatkan sumber pendapatan dari usaha penangkapan ikan, maka sangat diperlukan sekali modal, baik itu modal sendiri maupun modal pinjaman. Dimana usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk menyalurkan dana bagi masyarakat pesisir dalam bentuk kredit dana ekonomi produktif (DEP) melalui program PEMP.

Pemberian kredit ini bagi nelayan dapat membantu dalam menambah modal yang dapat digunakan untuk proses produksi. Dengan adanya penambahan modal serta kemampuan dalam pengelolaannya diharapkan akan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan yang diperoleh nelayan. Nelayan yang menerima kredit dituntut untuk menggunakan secara efisien dan efektif artinya benar-benar digunakan untuk pemenuhan kebutuhan. Dengan cara tersebut diharapkan hasil tangkapan akan meningkat, sehingga nelayan mampu mengembalikan kredit tepat waktunya beserta bunga pinjamannya.

Menurut hasil penelitian Purwaningsih (1997) pendapatan yang diterima oleh petani akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga petani dan keluarga. Ini ditunjukkan dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani penerima kredit lebih tinggi dari pada yang tidak menerima kredit. Pendapatan total keluarga akan mempengaruhi terhadap kemampuan petani dalam mengembalikan kredit. Bila pendapatan total keluarga tinggi maka kemampuan petani mengembalikan kredit menjadi besar. Sedangkan menurut penelitian Triyati (2002), keberhasilan kelompok tani P4K mempengaruhi peningkatan pendapatan petani P4K dalam jumlah kecil, karena peningkatan pendapatan petani ini lebih banyak disebabkan oleh faktor lain seperti adanya hasil dari pertanian, keseimbangan antara input yang dihasilkan dan output yang digunakan serta kebutuhan rumah tangga dan tanggungan keluarga yang besar.

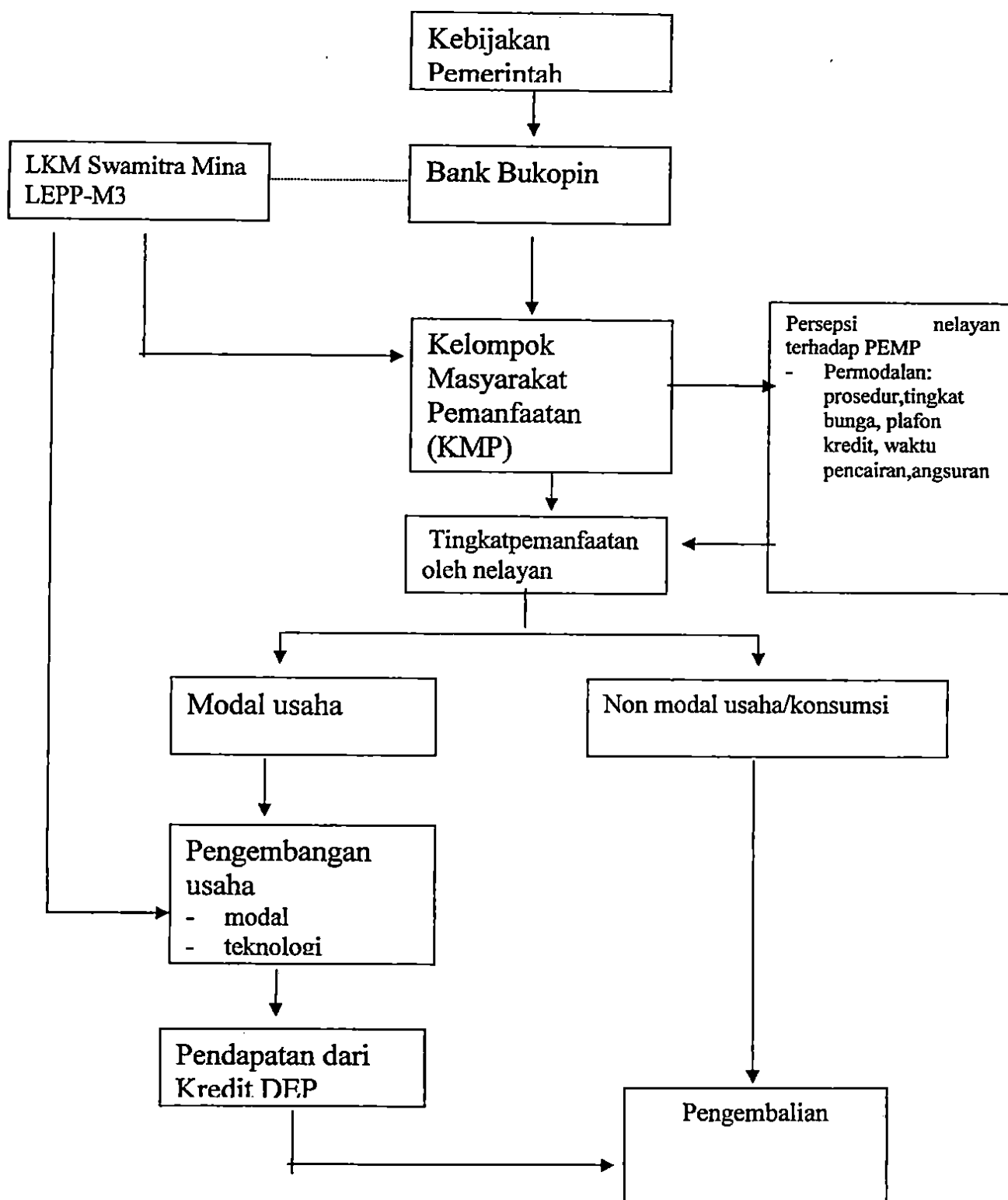
G. Kerangka berpikir

Salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi adalah dengan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor.. Dalam sektor perikanan salah satu kebijaksanaan peningkatan produksi dilaksanakan pemerintah dengan pemberian kredit program PEMP. PEMP merupakan suatu program pemberian dana ekonomi produktif (DEP) yang digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia yang akan mendidik dan mengarahkan nelayan kecil agar mau dan mampu menjangkau fasilitas kemudahan-kemudahan pembangunan yang tersedia untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok masyarakat pemanfaatan (KMP) , dimana kelompok mampu memberdayakan semua anggotanya untuk berperan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi semua anggotanya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarganya.

Program PEMP ini tentu menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari nelayan.. Persepsi nelayan terhadap kredit DEP didekati mengenai arti pentingnya kredit bagi nelayan untuk mengembangkan usahanya. yang berpersepsi baik tentu akan menganggap bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar digunakan untuk mengembangkan usahanya. Persepsi berhubungan dengan penyediaan permodalan bagi nelayan, diantaranya kemudahan prosedur untuk mendapatkan kredit, tingkat bunga yang dibebankan pada nelayan, plafon kredit dan waktu pencairan kreditnya. Tingkat bunga yang diberikan kelompok kepada nelayan mempengaruhi persepsi petani terhadap program PEMP. Tingkat bunga tersebut apakah terlalu tinggi, sedang atau rendah. Apakah sudah sesuai dengan keadaan nelayan atau justru malah memberatkan nelayan. Besarnya kredit yang diberikan pada nelayan juga dimungkinkan mempengaruhi persepsi nelayan terhadap program PEMP. Apakah kredit yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan nelayan untuk mengembangkan usahanya. Pencairan kredit dimungkinkan akan berpengaruh terhadap efektifitas penggunaan kredit. Waktu pencairan yang tepat / sesuai dengan kredit yang diterima. Sebaliknya kredit yang datang terlambat akan menimbulkan kekecewaan masyarakat penerima DEP yang akhirnya akan

mempengaruhi persepsi nelayan terhadap program PEMP. Kemudahan prosedur pengajuan kredit, sistem angsuran yang tidak memberatkan nelayan juga dimungkinkan berpengaruh terhadap persepsi nelayan terhadap program PEMP ini.

Dari persepsi tersebut dimungkinkan akan mempengaruhi tingkat pemanfaatan kredit oleh nelayan . Apakah peruntukan dari kredit tersebut telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pemanfaatan ini tentu ada yang digunakan nelayan untuk modal usaha dan juga untuk konsumsi. Sebagai modal usaha kredit ini digunakan untuk mengembangkan usaha penangkapan ikan. Pengembangan usaha dapat dilihat dari modal petani, teknologi dan pasar. Perkembangan usaha yang baik akan mempengaruhi nelayan dalam menggunakan teknologi yang ada. Nelayan akan menggunakan teknologi yang lebih maju untuk membantu usahanya. Dengan pemberian kredit sebagai modal usaha akan mempengaruhi pemasaran produk yang dihasilkan. Nelayan mampu menjual produknya dengan lancar dan dapat memperluas jangkauan pemasaran usahanya. Usaha yang terus berkembang akan dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Hal ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan. Nelayan yang tidak dapat mengalokasikan kreditnya dengan baik akan menimbulkan penggunaan kredit yang tidak efektif, misalnya untuk kebutuhan konsumtifnya. Hal ini akan berpengaruh dalam pengembalian kreditnya. Nelayan tersebut nantinya tidak akan optimal dalam mengembangkan usahanya, sehingga pendapatan yang diperoleh rendah dan tingkat pengembaliannya rendah (lihat gambar 1).



Gambar 1. Kerangka pemikiran

H. Hipotesis

Diduga faktor-faktor yang dipertimbangkan nelayan dalam pemanfaatan dana ekonomi produktif program PMEP adalah tempat pengajuan, modal, agama, beban anggota keluarga, tingkat harga, jaminan dan lain-lain.